

# ***Korupsi dan Kehutanan :***

## ***TITIK KRITIS PENYEBAB KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN***



Agus Affianto

Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM – Direktur Eksekutif Indonesian Forestry and Governance Institute (IFGI)

+62 81226999944

Email: [mas.picus@yahoo.co.id](mailto:mas.picus@yahoo.co.id) ; [denmas.picus@gmail.com](mailto:denmas.picus@gmail.com)

Disampaikan dalam seminar “Korupsi dan Kehutanan”, kerjasama antara Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM dan United Nations Office on Drugs and Crime.

Maret 2011

perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.



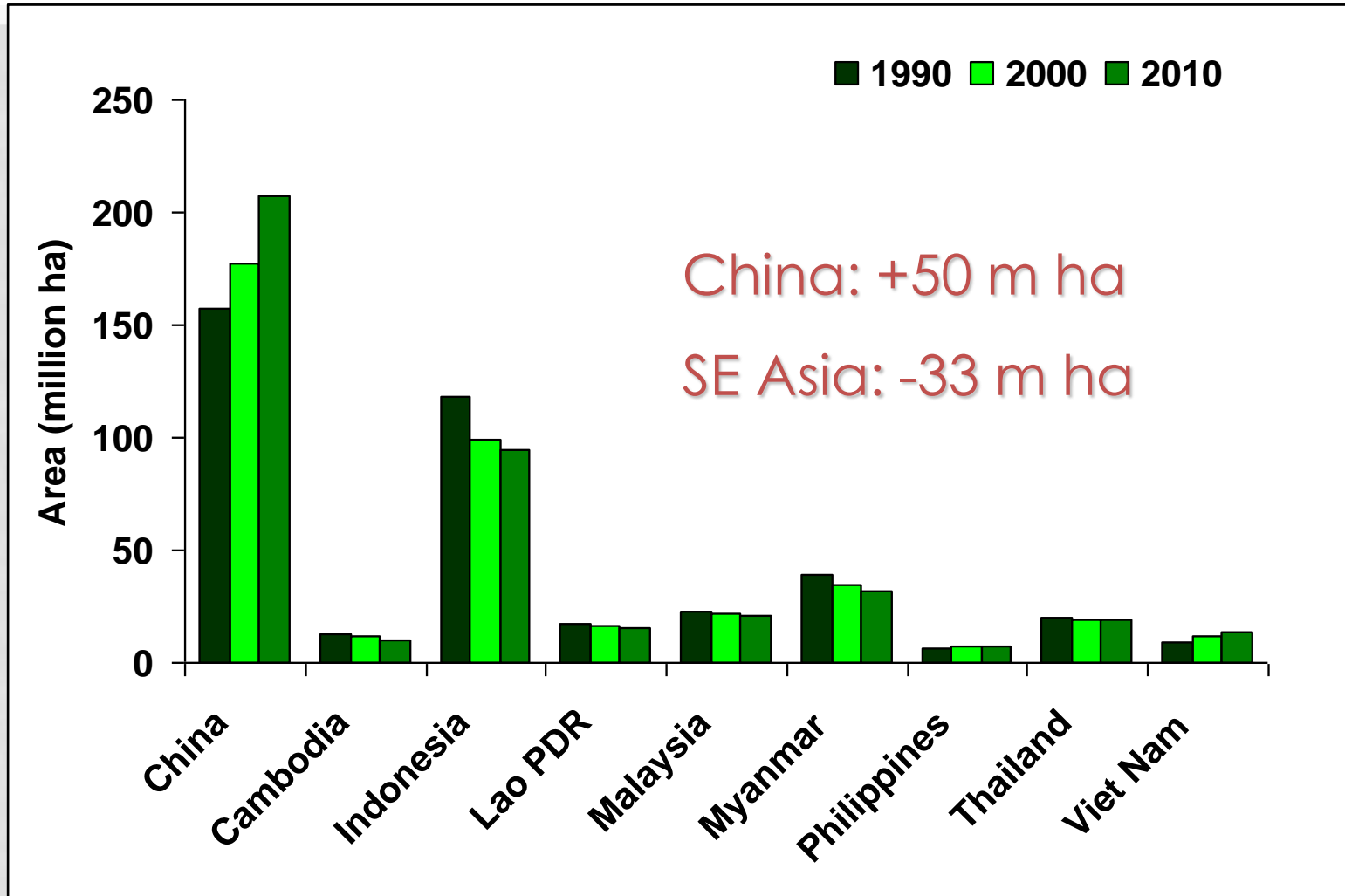
© Mayank Bhatnagar  
graphicreflections.org

C O R R U P T I O N

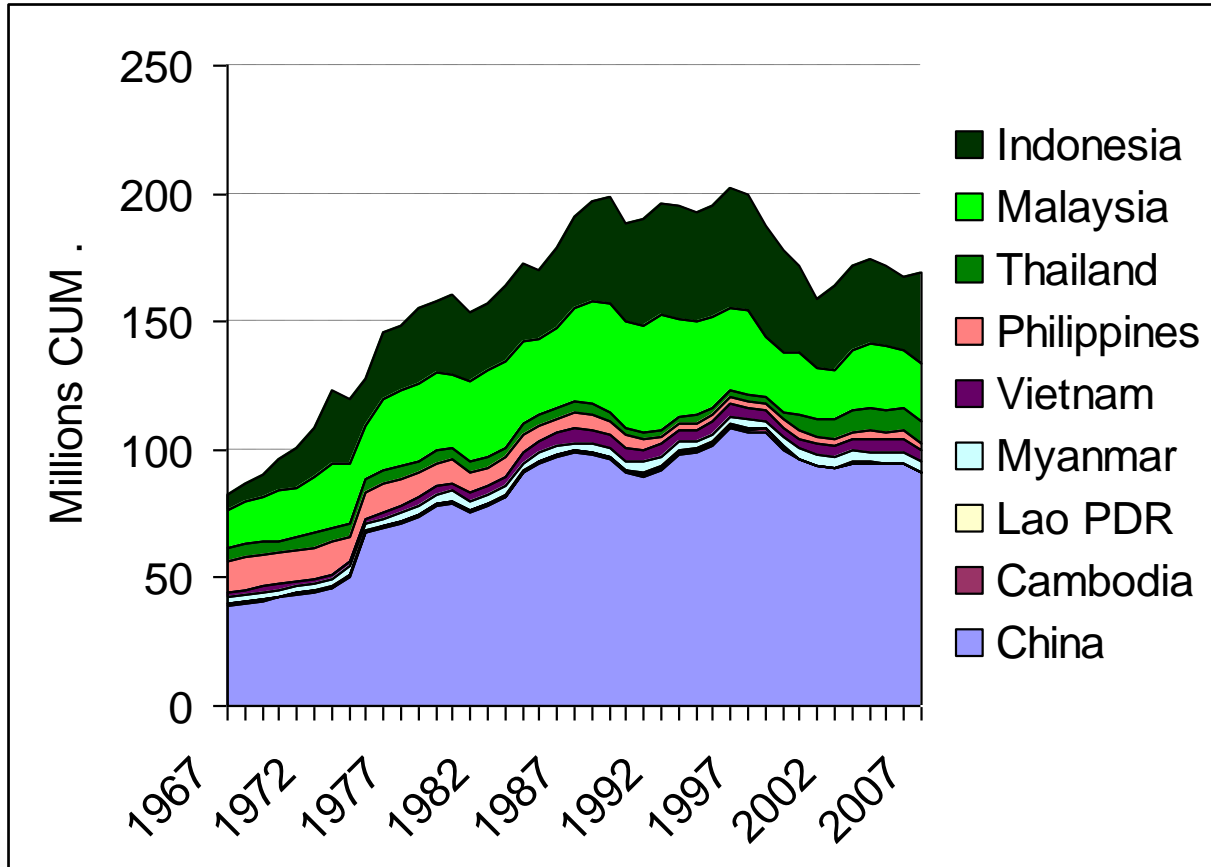


# KONTEKS KEHUTANAN ASIA & INDONESIA

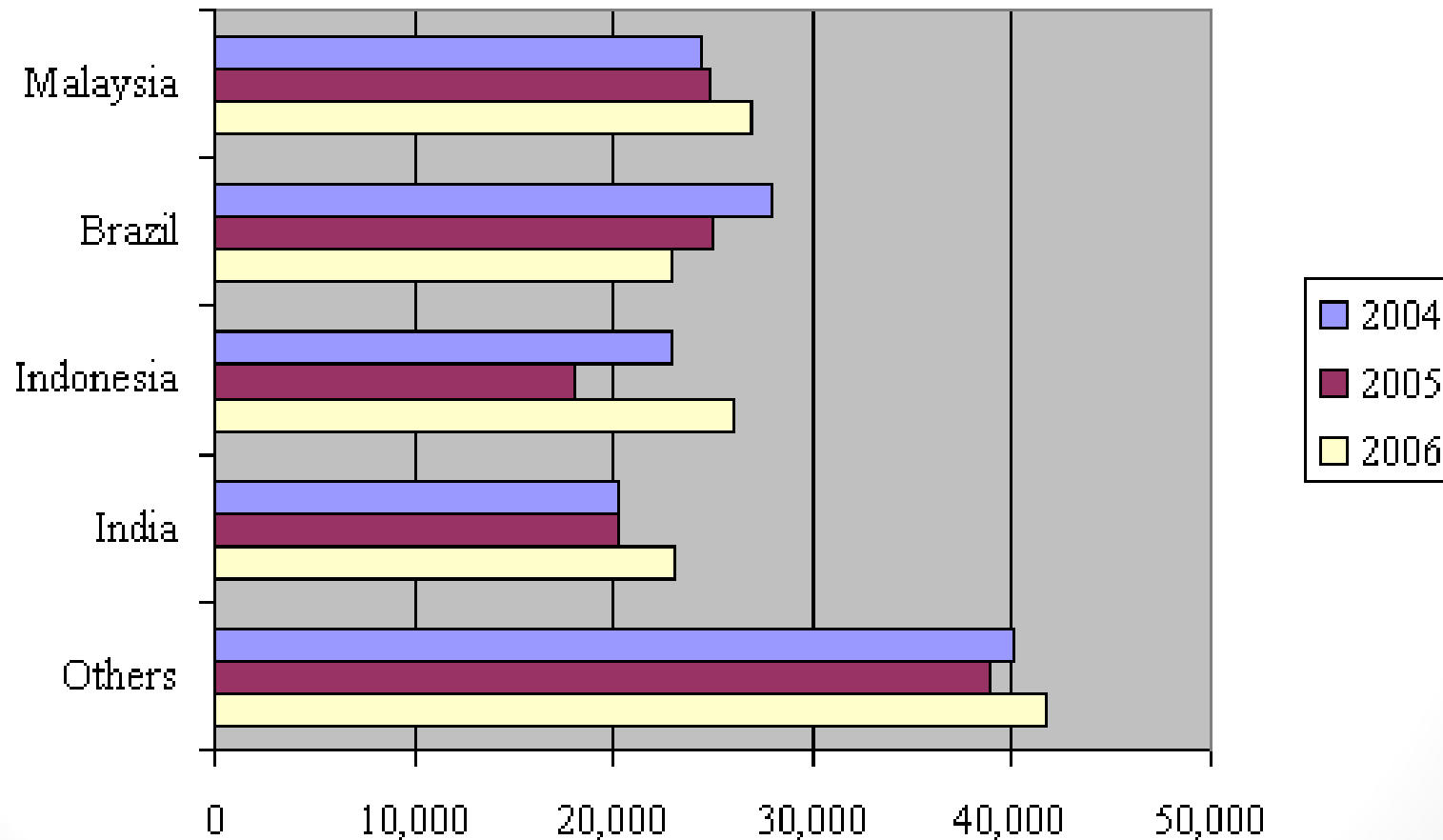
# FOREST COVER CHANGE 1990-2010



# Wood production



# Produsen kayu tropis utama (1000 m<sup>3</sup>)



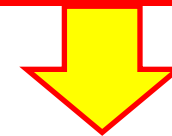
# DEFORESTASI & DEGRADASI HUTAN

Tahun	Luas Hutan (000 ha)	Sumber data
1950	162.290	Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1980	119.700,5	Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1985	118.545	FRA (FAO, 1990)
1990	99.409	FRA (FAO, 2010)
2000	97.857	FRA (FAO, 2010)
2010	94.432	FRA (FAO, 2010)



## Penyebab Utama:

- Illegal Logging
- Alih Fungsi Kawasan
- Penerbitan Lisensi (IUPHHK) yang tidak sesuai aturan



**Korupsi ?**

# Sumber kayu

## Legal

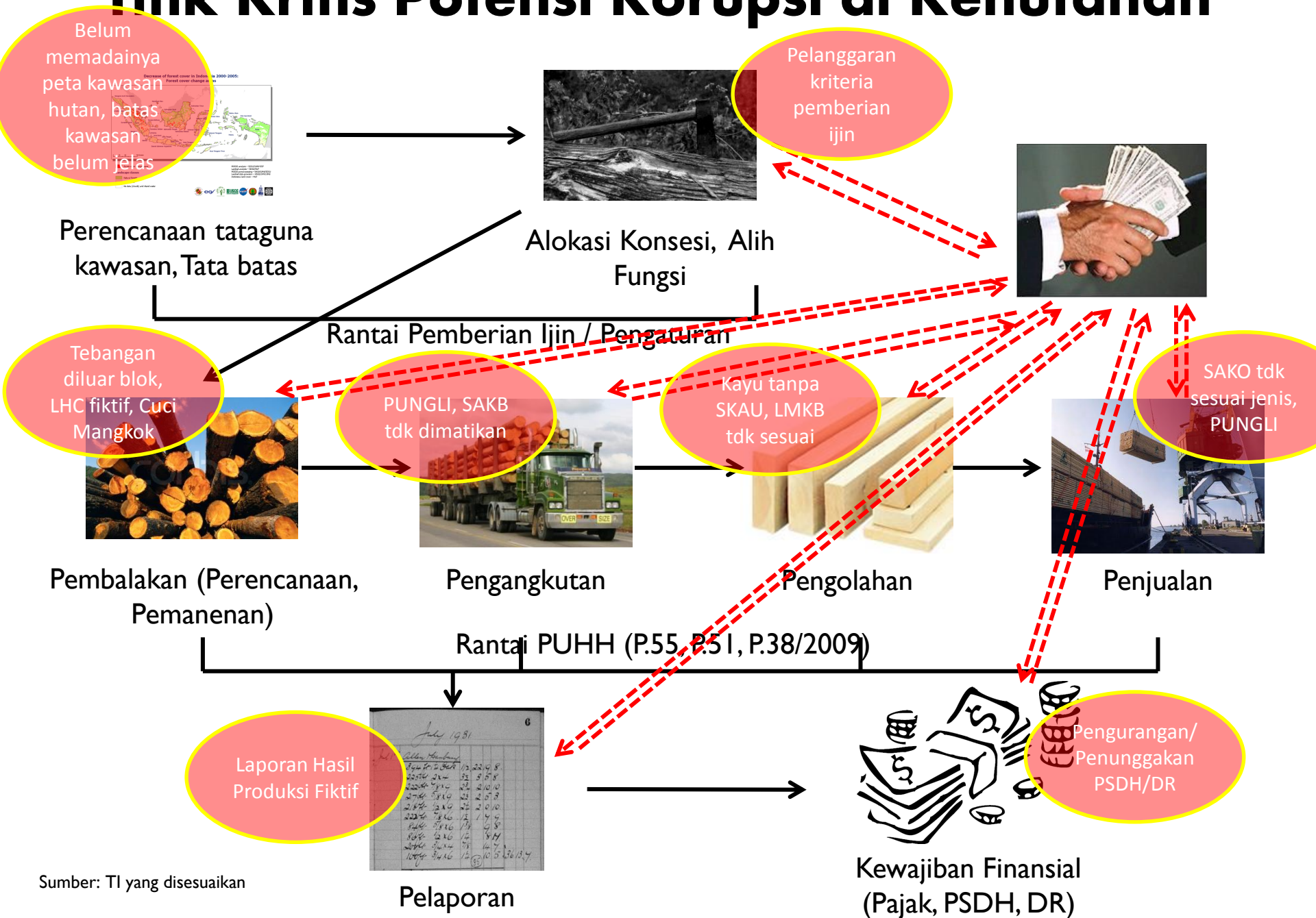
- HPH/IUPHHK (ijin dari Kemenhut);
- HTI/IUPHHK-HTI di hutan produksi (ijin dari Kemenhut);
- IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m<sup>3</sup> (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
- Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
- Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
- Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Kemenhut);
- HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
- KDTI (dikeluarkan oleh Kemenhut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);
- Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;

## Illegal

- Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
- Ijin Bupati di dalam kawasan hutan (misalnya IPKTM, HPHH, IPPK) yang diterbitkan setelah 8 Juni 2002
- IPK HTI dengan stok tebangan >20m<sup>3</sup>;
- Konsensi Kopermas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah Desember 2004



# Titik Kritis Potensi Korupsi di Kehutanan



Sumber: TI yang disesuaikan

# Upaya Pencegahan

Penyediaan peta kawasan hutan yang mudah diakses

- Tata batas kawasan yang jelas dan temu gelang
- Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan dan PUHH
- Penyiapan sistem PUHH Online (timber tracking)
- Law Enforcement dengan sanksi hukum yg tegas



**Terima Kasih**